



Village Financial Management Training Equipped with SisKeuDes Supporting Application Design in Parongpong District, West Bandung Regency

Riauli Susilawaty Hutapea^{1*}, Arwan Gunawan², Muhammad Umar Mai³,
Sudradjat⁴, Sugih Sutrisno Putra⁵, Tjetjep Djuwarsa⁶
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

Corresponding Author: Riauli Susilawaty Hutapea riauli.susilawati@polban.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Finance, Village Fund, Village Fund Allocation, Supporting Application, Village Financial System (SisKeuDes)

Received : 17, September

Revised : 15, October

Accepted: 10, November

©2022 Hutapea, Gunawan, Mai, Sudradjat, Putra, Djuwarsa: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Bandung State Polytechnic (Polban) Accounting Department intends to participate in providing solutions to problems faced by villages in Parongpong District through the Community Service (PkM) program. The solution offered is to increase the knowledge and competence of village government officials regarding financial governance through training on the Budget Cycle and Accounting Cycle for DD and ADD administration, followed by a mentoring program in using supporting applications for the Village Financial System. This activity is also intended as a media for students to apply their knowledge directly in the community in relevant fields, a form of link and match between AMP Study Program and users, namely local government, and a form of self-actualization of students in society. The results of the implementation of the PkM program activities that have been carried out include: Training related to the provision of material on the Budget Cycle and Accounting Cycle as well as Assistance regarding the Practice of Using Village Financial System Support Applications (SisKeuDes), as well as ways to understand and overcome the Inspector General's findings.

Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa Dilengkapi dengan Perancangan Aplikasi Pendukung SisKeuDes di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat

Riauli Susilawaty Hutapea^{1*}, Arwan Gunawan², Muhammad Umar Mai³, Sudradjat⁴, Sugih Sutrisno Putra⁵, Tjetjep Djuwarsa⁶
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

Corresponding Author: Riauli Susilawaty Hutapea riauli.susilawati@polban.ac.id

ARTICLE INFO

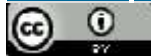
Kata Kunci: Keuangan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Aplikasi Pendukung, Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes)

Received : 17, September

Revised : 15, October

Accepted: 10, November

©2022 Hutapea, Gunawan, Mai, Sudradjat, Putra, Djuwarsa: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRAK

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung (Polban) bermaksud untuk ikut serta memberikan solusi atas masalah yang dihadapi desa-desa di Kecamatan Parongpong melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur pemerintah desa terkait tata kelola keuangan melalui pelatihan Siklus Anggaran dan Siklus Akuntansi untuk penatausahaan DD dan ADD, yang dilanjutkan dengan program pendampingan dalam menggunakan aplikasi pendukung Sistem Keuangan Desa. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai media mahasiswa untuk menerapkan ilmu mereka secara langsung di masyarakat pada bidang yang relevan, bentuk link and match antara Prodi AMP dengan users yaitu pemerintah daerah, dan wujud aktualisasi diri mahasiswa di masyarakat. Hasil pelaksanaan kegiatan program PkM ini yang telah terlaksana meliputi: Pelatihan terkait pemberian materi Siklus Anggaran dan Siklus Akuntansi serta Pendampingan terkait Praktik Penggunaan Aplikasi Pendukung Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes), dan juga cara untuk memahami dan mengatasi temuan-temuan Irjen.

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa terbesar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa.

Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 2 menjelaskan bahwa dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Dalam rangka mendorong implementasi SisKeuDes secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SisKeuDes secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SisKeuDes. Penyebar-luasan aplikasi SisKeuDes ini dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kecamatan Parongpong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wilayah Parongpong terkenal dengan wisata bunga. Mayoritas petani di wilayah ini merupakan petani bunga dan tanaman hias lainnya. Ada juga yang bercocok tanam sayuran. Petani bunga terpusat di daerah Cihideung. Tanaman hias, bunga dan bibit pohon berjajar di sepanjang jalan utama desa Cihideung. Hal ini menjadi daya tarik Kecamatan Parongpong. Bahkan pemerintah Bandung Barat mendeklarasikan wilayah Parongpong sebagai kota wisata bunga.

Kantor kecamatan Parongpong beralamat di Jl. Kolonel Masturi No.291, Cihanjuang Rahayu, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559, Indonesia. Saat ini Kecamatan Parongpong memiliki tujuh Pemerintah Desa (PemDes), yaitu:

1. PemDes Cigugur Girang;
2. PemDes Cihanjuang Rahayu;
3. PemDes Cihanjuang;
4. PemDes Cihideung;

5. PemDes Ciwaruga;
6. PemDes Karyawangi; dan
7. PemDes Sariwangi.

Berdasarkan survei pendahuluan, kantor kecamatan Parongpong memiliki aparatur pemerintah desa sebagian besar berpendidikan SLTA. Pengelolaan dan pencatatan akuntansi dana desa dikerjakan oleh aparatur pemerintah desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan memiliki kemampuan aksesibilitas terhadap teknologi informasi yang kurang. Sehingga, menyebabkan terhambatnya proses penatausahaan dan terlambatnya penyerahan pertanggung-jawaban keuangan dana desa ke kecamatan. Oleh karena itu, agar dana desa yang diperoleh setiap desa yang sudah dialokasikan itu sesuai peruntukannya, maka perlu ditunjang dengan penatausahaan dan pencatatan akuntansi yang memadai. Namun demikian, kondisi ideal ini belum dilaksanakan secara keseluruhan di pemerintahan kecamatan Parongpong.

Terhambatnya proses pengelolaan dan pelaporan dana desa ini bisa mengganggu kelancaran program pembangunan desa. Dana desa yang seyogianya dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi tidak berjalan sepenuhnya. Hal ini pada gilirannya akan berdampak pada pelayanan publik yang kurang maksimal dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap aspek perekonomian, politik, dan sosial masyarakat desa. Pelatihan penatausahaan dana desa dianggap perlu untuk mengatasi situasi dan kondisi yang ada saat ini di kecamatan Parongpong. Penyuluhan dan pelatihan yang pernah diperoleh aparatur kecamatan Parongpong dirasakan masih kurang dan belum menyentuh langsung aspek teknis dan operasionalnya. Apalagi bila ditelusur sampai ke pemerintahan di desa, maka akan semakin terlihat kesenjangan kondisi ideal dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, kantor kecamatan Parongpong mengharapkan adanya peningkatan wawasan keilmuan dan keterampilan bagi para pelaksana teknis pengelola dana desa. Program yang diharapkan berbentuk pelatihan dan pendampingan bagi aparatur pemerintah desa dari pihak yang kompeten.

Identifikasi dan Penyelesaian Masalah

Berdasarkan latar belakang dan analisis kondisi eksisting, selanjutnya dapat diidentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian besar desa-desa di Kecamatan Parongpong belum sepenuhnya mampu menyelesaikan laporan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai peraturan yang berlaku secara tepat waktu.
2. Masih banyak temuan atas hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) terhadap laporan penggunaan DD dan ADD di Kecamatan Parongpong.
3. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Parongpong dalam penatausahaan dan akuntansi dana desa.
4. Diperlukan proses pendampingan di lapangan untuk proses penatausahaan dan akuntansi dana desa di desa desa yang ada di wilayah Kecamatan Parongpong.

Pada tanggal 7 Februari 2022, kami tim PkM Jurusan Akuntansi, khususnya Program Studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan Polban telah melakukan Survei pendahuluan dan melakukan dialog/diskusi dengan Kepala Kantor Kecamatan Parongpong yang didampingi oleh Kepala desa Ciwaruga.

Dari hasil diskusi disepakati bahwa penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi itu akan dilakukan program peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan pendampingan penatausahaan dan akuntansi DD dan ADD bagi aparatur pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Parongpong.

Manfaat kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah:

1. Meningkatnya kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) dalam mengelola penatausahaan dan akuntansi aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Parongpong.
2. Meningkatkan peran dan partisipasi Jurusan Akuntansi, khususnya Program Studi Akuntansi Pemerintahan, Polban secara nyata di masyarakat.

Dampak sosial yang diharapkan dari kegiatan PkM ini adalah:

1. *Up-dating* ilmu pengetahuan dan teknologi di kelompok aparatur pemerintah desa Kecamatan Parongpong.
2. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah desa diharapkan akan menaikkan produktivitas kerja.
3. Meningkatkan atensi dosen Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan pada institusi Polban terhadap pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa.
4. Mengembangkan ilmu akuntansi manajemen pemerintahan, terutama pada penatausahaan dan akuntansi dana desa, di Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan Polban.
5. Membantu kelancaran program pembangunan desa.
6. Turut melaksanakan kebijakan publik.

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak daripada entitas pemerintahan secara umum suatu negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang merupakan tata kelola keuangan desa harus diatur secara seksama sehingga ada keseragaman dalam membuat kebijakan umum dan mengimplementasikannya, dan sampai dengan dilakukan audit atau pemeriksaan atas pengelolaan keuangan oleh para pemeriksa, seperti: APIP, Inspektorat, BPKP, dan BPK.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ketika diterapkan, menimbulkan persoalan yang banyak terutama terkait dengan ketersediaan staf yang menguasai konsep akuntansi dan penerapannya; umumnya di tingkat entitas pemerintahan desa dan khususnya di pemerintahan desa wilayah Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Camat Parongpong (2022) bahwa Perangkat Desa di wilayahnya secara umum tidak menguasai konsep akuntansi dan penerapannya, hal ini tampak ketika sering terjadi kesalahan yang berulang dari hasil temuan Inspektorat, di mana rekomendasi Inspektorat sulit untuk ditindaklanjuti dengan alasan utama kurangnya penguasaan konsep akuntansi dan penerapannya.

Selain daripada itu, Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Parongpong yang menangani bidang keuangan sudah membiasakan menggunakan aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Daerah) ; meskipun SisKeuDes tidak wajib dipergunakan pada tingkat entitas pemerintahan desa. Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Parongpong sering mendapat pelatihan dari Tim BPKP dalam hal menggunakan aplikasi SisKeuDes dan lancar saja dalam pemakaian sehari-hari, namun pada saat ada rekomendasi dari Inspektorat terjadi penumpukan temuan yang bersifat pengulangan, di mana Perangkat Desa bidang keuangan sulit untuk menindaklanjuti dengan persoalan utama adalah tidak menguasai konsep akuntansi dan penerapannya.

Dengan demikian, Camat Parongpong menerima dengan tangan terbuka Tim Pelaksana PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) Politeknik Negeri Bandung (Polban) ketika menawarkan untuk memberikan pelatihan siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam rangka Tata Kelola Keuangan Desa serta perancangan aplikasi pendukung SisKeuDes pada Pemdes wilayahnya. Perancangan aplikasi pendukung tersebut bersifat menjembatani antara penguasaan siklus anggaran dan siklus akuntansi dengan SisKeuDes.



Gambar 1. Survei Awal Bertemu Camat Parongpong –Kab. Bandung Barat

PELAKSANAAN DAN METODE

Program PkM ini diawali dengan survei pendahuluan yang dilakukan ke kantor Kepala Desa Ciwaruga untuk berdiskusi dengan Kepala Kantor Kecamatan Parongpong dan Kepala Desa Ciwaruga. Dari hasil diskusi dan analisis kondisi existing, selanjutnya dapat diidentifikasi langkah-langkah penyelesaian untuk masalah yang dihadapi ; sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan berupa peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang penatausahaan dan akuntansi dana desa.
2. Memberikan praktik penatausahaan dan akuntansi dana desa secara manual dan komputerisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan simulasi praktik penatausahaan dan akuntansi dana desa dengan mengambil persoalan/kasus yang sesungguhnya terjadi di pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Parongpong.

4. Melakukan pendampingan kepada aparaturnya pemerintah desa hingga mampu melakukan penatausahaan dan akuntansi dana desa secara manual dan komputerisasi secara mandiri.

Program PkM ini dalam pelaksanaannya akan menggunakan dua media. Pertama, media on line atau daring menggunakan zoom meeting; Kedua, media tatap muka atau luring menggunakan fasilitas laboratorium komputer, yang kemungkinannya dilakukan di Jurusan Akuntansi Polban.

Media *online* atau daring digunakan pada saat menyampaikan :

1. Konsep Anggaran secara umum terkait dengan penatausahaan AD dan ADD dalam siklus anggaran;
2. Siklus dan persamaan akuntansi, jurnal umum dan khusus dengan kasus akuntansi keuangan desa;
3. Proses pembuatan Buku Besar dan Kertas Kerja dengan kasus akuntansi keuangan desa; dan
4. Proses penyusunan Laporan Keuangan Desa dengan kasus akuntansi keuangan desa.

Media tatap muka atau luring digunakan pada saat menyampaikan :

1. Konsep mengintegrasikan AD, ADD, dan Laporan Keuangan Desa; dan
2. Simulasi penggunaan Aplikasi Pendukung SisKeuDes.

Partisipasi mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

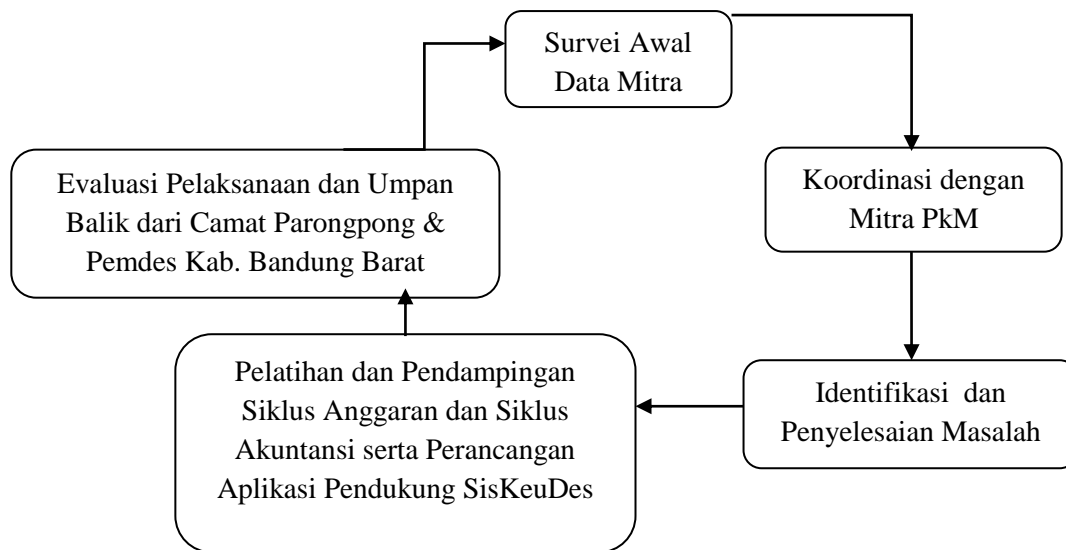
1. Memberikan masukan saat survei pendahuluan dan ikut serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi
2. Menyertakan stafnya yang bertugas melakukan penatausahaan dan akuntansi dari semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat untuk mengikuti program PkM ini.
3. Menyediakan sarana untuk tempat pelaksanaan pelatihan dan pendampingan.
4. Mengidentifikasi permasalahan, berupa dokumen, penatausahaan dan akuntansi dana desa yang sebenarnya terjadi sebagai bahan simulasi pada saat pelatihan.
5. Melakukan pendampingan bersama-sama dengan dosen-dosen yang tergabung dalam tim PkM Jurusan Akuntansi Polban.

Evaluasi Pelaksanaan dan Umpan Balik

Evaluasi program ini akan dilakukan dengan cara:

1. Mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan pelatihan dengan mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparaturnya pemerintah desa pada penatausahaan dan akuntansi dana desa secara manual dan komputerisasi
2. Mengevaluasi program pendampingan untuk melihat implementasi ilmu yang diperoleh saat pelatihan dengan mengukur keberhasilan melakukan penatausahaan transaksi dana desa dan ketepatan pengumpulan laporan di masing-masing desanya.
3. Melakukan koordinasi dengan aparaturnya kecamatan untuk mengukur kinerja peserta pelatihan dalam ketepatan waktu pengumpulan surat pertanggung jawaban keuangan / pengelolaan dana desa.

4. Melakukan koordinasi di tim dosen narasumber untuk mengevaluasi keberhasilan program ini sesuai dengan target dan luaran.



Gambar 2. Diagram Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat - Polban

HASIL

Demografi Peserta atau mitra PkM ini diikuti oleh 16 (enam belas) Perangkat Desa wilayah Kecamatan Parongpong Kab. Bandung Barat, seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Demografi Peserta

No.	Nama Perangkat Desa	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan	Jabatan
1	Aep Gojali, S.T.	L	S1	Sekdes
2	Dewi	P		Kaur Keuangan
3	Bagus Hermawan, S.Pd.	L	S1	Sekdes
4	Aden	L		Kaur Keuangan
5	Dedah Jubaedah	P	S1	Sekdes
6	Asep Muhidin	L		Kaur Keuangan
7	Ayi Taryana, S.E.	L	S1	Sekdes
8	Hendrawan	L	S1	
9	O Supriatna	L		Sekdes
10	Yuyun Purwaningsih	P		Kaur Keuangan
11	Adang Hidayat	L		Sekdes
12	Desi	P		Kaur Keuangan
13	Maman Sutrisman	L	S1	Sekdes
14	Cecep Ikbar	L		Kaur Keuangan
15	Indri Rahmawati	P		Kaur Keuangan
16	Asep Taryana	L		Kaur Keuangan

Pelatihan Siklus Anggaran dan Siklus Akuntansi

Kegiatan PkM diawali dengan pengarahan umum oleh Ketua Tim PkM Riauli Susilawaty Hutapea dan Camat Parongpong, dilanjutkan memberikan *pre test* terkait dengan seluruh materi pelatihan yang akan diberikan. Pemberi materi pelatihan oleh Muhammad Umar Mai dengan materi pelatihan Siklus Anggaran; Riauli Susilawaty Hutapea, Arwan Gunawan, Sudradjat dengan materi pelatihan Siklus Akuntansi; dan Sugih Sutrisno Putra & Tjetjep Djuwarsa dengan materi pendampingan praktik Hasil Perancangan Aplikasi Pendukung SisKeuDes.

Pola Tata Kelola Keuangan Desa, diawali dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APB Desa yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di Desa dan menghasilkan dokumen RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi Desa. Terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya RPJM (Rencana Pembanguna Jangka Menengah) Desa.

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Ketentuan Umum dapat digambarkan berikut:



Gambar 3. Ketentuan Umum

Berdasarkan Ketentuan Umum di atas, dilakukan proses eksekusi anggaran dengan menerapkan konsep dan aplikasi akuntansi, yang meliputi: menjelaskan pengertian akuntansi; menjelaskan kegunaan informasi akuntansi dan pemakai akuntansi; menjelaskan bidang dan profesi akuntansi;

menjelaskan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), konsep dasar akuntansi dan penggolongan entitas pemerintahan; menjelaskan konsep persamaan akuntansi; mencatat transaksi ke dalam persamaan akuntansi; menyusun laporan keuangan berdasarkan data persamaan akuntansi; menyebutkan definisi jurnal; menjelaskan kaidah debit dan kredit; menjelaskan karakteristik suatu akun; mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai kaidah yang berlaku; menjelaskan karakteristik suatu rekening/akun; menjelaskan sifat dasar rekening Aset, Liabilitas, Ekuitas, Penghasilan dan Beban; menjelaskan kaidah debit dan kredit terkait saldo rekening/akun yang normal; menutup dan membuka kembali buku besar umum; menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan kegunaannya untuk menemukan kesalahan; menjelaskan pengertian penyesuaian; menjelaskan tujuan penyesuaian; membuat ayat jurnal penyesuaian; menjelaskan pengertian dan fungsi kertas kerja; menyusun kertas kerja; menjelaskan pengertian laporan keuangan; menyusun laporan keuangan; membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan; dan membuat ayat jurnal pembalik.

Pendampingan Praktik Hasil Perancangan Aplikasi Pendukung Sistem Keuangan Dewsa (SisKeuDes)

Aplikasi dengan nama “Aplikasi Siklus Akuntansi Desa” (ASAD) dibuat untuk melengkapi kebutuhan pengguna. Berbasis VBA MS-Excel, ASAD dapat dimanfaatkan bukan saja untuk kebutuhan praktis, tetapi juga pedagogik. Karena berbasis VBA MS-Excel (*offline*) dan *mobile/portable*, kebutuhan praktis ASAD akan terbukti efektif misalnya ketika aplikasi *online* yang tersedia tidak berjalan; karena adanya gangguan koneksi internet, kebijakan yang tertunda, dan lainnya. Secara pedagogik, karena berbasis VBA MS Excel, para pengguna yang awam sekalipun dapat menelusuri bukan saja tentang substansi pencatatan akuntansi dan siklusnya, namun juga dapat mereplikasi algoritma yang terlapor dalam Excel. Meski bersifat generik, aplikasi dibuat bukan saja berguna untuk para bendahara desa, tetapi juga untuk pejabat desa lainnya dengan kepentingan yang lebih umum. Selain itu, berbeda dengan aplikasi yang sudah ada, ASAD dibuat secara fleksibel dengan menyediakan pencatatan basis kas (*cash basis*) maupun akrual (*accrual basis*).

Peraturan/Perundangan Rujukan

Secara prinsip, tidak ada perbedaan antara akuntansi untuk sektor privat dengan akuntansi untuk sektor publik. Perbedaan terdapat pada aspek tujuan, dan beberapa bagian dari format pelaporan sebagai konsekwensinya. Selain itu, akuntansi sektor publik sarat dengan berbagai macam peraturan perundangan; yang juga sering berubah-ubah. Pada Bagan Akun, misalnya, daftar akun disediakan dari nomor kepala akun satu hingga nomor sembilan dengan nama-nama akun yang *given*. Juga, 3 (tiga) digit kode untuk nama-nama akun berlaku secara nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang digunakan dalam merancang ASAD:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Metode Pembuatan Aplikasi

Berikut adalah penjelasan ringkas beberapa langkah pembuatan aplikasi:

- 1) Identifikasi masalah melalui studi dokumen (termasuk peraturan perundangan, berkas laporan dan formulir-formulis yang digunakan), observasi, dan wawancara dengan para pengguna;
- 2) Menganalisis kebutuhan informasi pengguna;
- 3) Merancang beberapa format yang dibutuhkan dalam laporan keuangan;
- 4) Membuat rancangan Aplikasi Siklus Keuangan Desa berbasis VBA MS-Excel;
- 5) Melakukan pengujian dan implementasi terhadap rancangan aplikasi excel yang dibuat;
- 6) Memberikan pelatihan, sosialisasi serta pendampingan dalam penggunaan aplikasi excel yang dibuat kepada para mitra desa (terdiri dari 16 peserta pengurus desa dari 7 desa di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat);
- 7) Melakukan evaluasi terhadap rancangan Aplikasi Pendukung SisKeuDes dengan excel yang dibuat.

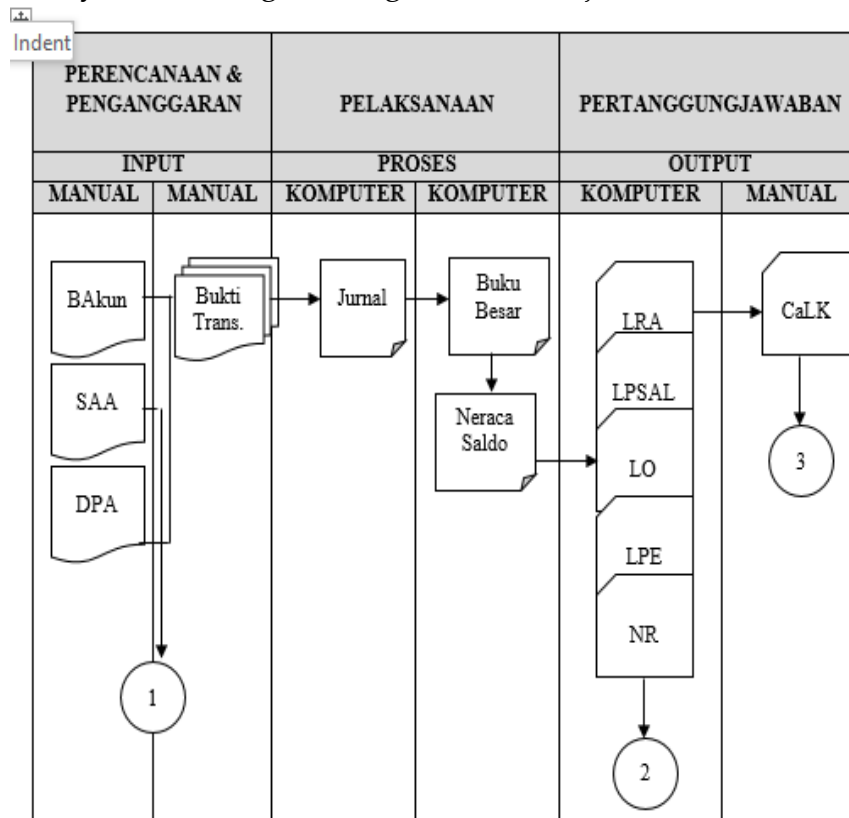
Rancangan Struktur ASAD

Berikut Gambar 1 menjelaskan rancangan struktur ASAD. Struktur ASAD dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori utama: (1) di baris pertama adalah kategori siklus akuntansi sektor publik; perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, (2) di baris kedua adalah kategori komponen sistem; input, proses dan output, (3) di baris ketiga adalah kategori penggunaan teknologi; manual, dan komputerisasi. Kategori (3) tidak mutlak sepenuhnya manual. Misalnya, SAA sebagian diproses tidak manual, terutama pada saat alih periode dari suatu periode ke periode akuntansi berikutnya dimana catatan pada jurnal dan SAA periode sebelumnya dihapus atau dikosongkan secara otomatis oleh program. Hal serupa pada CaLK, data kuantitatif yang berasal dari laporan-laporan keuangan diimpor secara otomatis.

Seperti telah disebut dalam pendahuluan, struktur ASAD dirancang secara generik untuk keperluan yang lebih umum, melampaui kebutuhan terbatas para bendaharawan semata. Selain itu juga, struktur ASAD dirancang fleksibel yang serentak menyediakan akuntansi basis kas dan akrual. Meski demikian, para bendahara dengan mudah dapat mengakses informasi

keuangan bidang tugasnya, misalnya kas umum, dari buku besar secara otomatis. Selain itu, jika belum siap, para pengguna aparat desa dapat melakukan pencatatan akuntansi berbasis kas. Pada bagan akun (Bakun), fitur disiapkan juga untuk memilih akun-akun yang sesuai realita desa, dan dapat mengabaikan akun-akun yang tidak mencerminkan aktifitas nyata desa.

Juga, karena berbasis VBA MS-Excel, fitur-fitur yang fleksibel dapat diakses melalui format *sheet excel* atau menggunakan *user form*. Melalui format *sheet excel*, para pengguna dapat mengintip algoritma excel sebagai sarana pembelajaran dan juga dapat melakukan *copy paste* secara konvensional. Fitur *user form*, di sisi lain, disediakan karena adanya algoritma yang berulang, untuk kenyamanan dan keamanannya. Sementara ini, tiga buah *user form* digunakan dalam ASAD, yaitu: saat login, mengisi SAA, dan jurnal.



Gambar 4. Struktur ASAD

Keterangan:

- a) Bakun = Bagan Akun
- b) SAA = Saldo Awal Anggaran
- c) DPA = Daftar Pelaksanaan Anggaran
- d) LRA = Laporan Realisasi Anggaran
- e) LPSAL = Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f) LO = Laporan Operasional
- g) LPE = Laporan Perubahan Ekuitas
- h) NR = Neraca
- i) 1,2,3 = Wajib dilaporkan
- j) Buku Kas Umum, dan buku-buku kas pembantu lainnya (tugas-tugas kebhendaharaan); bisa diambil dari Buku Besar, wajib dilaporkan

Spesifikasi File Excel dalam ASAD Tabel Menu

Setelah login, tabel menu digunakan untuk dapat masuk ke tabel-tabel tertentu dengan cara klik salah satu kotak tombol tabel yang diinginkan. Ditunjukkan dalam Gambar 5, terdapat 13 kotak tombol dalam tabel menu, terdiri dari: Setup, Bakun, SAA, DPA, Jurnal, BB, NS, LRA, LPSAL, LO, LPE, NR & CaLK. Bergerak dari sisi kiri ke kanan gambar, disain dan urutan penempatan kotak-kotak tombol tabel menggambarkan urutan tahapan pencatatan akuntansi dalam suatu periode anggaran tertentu. Tombol Salin Saldo dan Hapus Jurnal digunakan sebelum melakukan pencatatan akuntansi ke periode berikutnya. User dapat menggunakan aplikasi secara fleksibel; bulanan, semesteran atau tahunan sesuai kebutuhan. Berikut dalam Gambar 5 adalah kode program untuk membuat 13 tombol menu yang dimaksud.



Gambar 5. Menu

Tabel Setup

Tabel Setup merupakan *master data* karena menyediakan tabel pengaturan pengguna dimana para pengguna dapat memasukkan sejumlah identitas periode pelaporan keuangan desa. Sementara ini, kami hanya menyediakan fasilitas *drop-down* untuk sel kosong nama desa, tahun anggaran, dan bulan berjalan.

 PENGATURAN PENGGUNA 	
ITEM	URAIAN
Nama Pemkab	: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Nama Kecamatan	: Kecamatan Parongpong
Nama Desa	: Cihanjuang
Alamat	: Jalan Cihanjuang
Tahun Anggaran	: 2022
Nama PTPKD	:
NIP PTPKD	:
Bulan Berjalan	: Juli



Gambar 6. Setup

Tabel Bagan Akun (Bakun)

Dari sisi kebutuhan pembuatan program, Bagan Akun (Bakun) meskipun pasif, namun teramat vital untuk alasan-alasan: (1) disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, (2) sebagai panduan untuk menentukan suatu transaksi ke dalam kode atau jenis-jenis akun tertentu dari 9 (sembilan) jenis akun yang tersedia, (3) sebagai panduan untuk menentukan suatu transaksi diposisikan sebagai akun yang akan mempengaruhi LRA, LPSAL, LO, LPE ataukah NR, (4) mengikuti (2) dan (3), maka juga akan menentukan saldo normalnya, apakah dicatat sebagai debit atau kredit. Karena itu, kealpaan terhadap pemahaman fitur ini akan memberikan pencatatan dan pelaporan akuntansi yang keliru secara menyeluruh.

 BAGAN AKUN 			
KODE	URAIAN AKUN	POSISI	SN
	ASET	NRC	Db
11	ASET LANCAR	NRC	Db
111	Kas dan Setara Kas	NRC	Db
11101	Kas di Bendahara Desa	NRC	Db
11102	Rekening Kas Desa	NRC	Db
11103	Kas di x	NRC	Db
11104	Kas di xx	NRC	Db
11105	Kas Lainnya	NRC	Db
11106	Setara Kas	NRC	Db
112	Investasi Jangka Pendek	NRC	Db
11201	Investasi dalam Saham	NRC	Db
11202	Investasi dalam Deposito	NRC	Db
11203	Investasi dalam SUN	NRC	Db
11204	Investasi dalam SBI	NRC	Db
11205	Investasi dalam SPN	NRC	Db
11206	Investasi Jangka Pendek x	NRC	Db



Gambar 7. Bagan Akun (Bakun)

 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Parongpong Cihanjuang DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DESA 		
Cari Akun	4 PENDAPATAN - LRA	
AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH
4	PENDAPATAN - LRA	
41	PENDAPATAN ASLI DESA - LRA	
411	Hasil Usaha Desa - LRA	-
41101	Kontribusi/Penyisihan dari BUMDesa - LRA	
41102	Kontribusi/Penyisihan dari BUMDes - LRA	
41103	Kontribusi/Penyisihan dari PAB XXX - LRA	
412	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa - LRA	-
41201	Tanah Kas Desa - LRA	
41202	Bangunan Desa - LRA	
41203	Jalan Desa - LRA	
41204	Lain-lain Kekayaan Milik Desa - LRA	
413	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat - LRA	-
41301	Urunan Desa dari Pemilik Tanah - LRA	
52804	Bantuan Kepada LINMAS	
52805	Belanja Bantuan Keuangan Kepada BUMDes XXX	
52806	Belanja Bant. Biaya Pilkades	
52807	Bantuan Penunjang Kegiatan 10 Program Pokok PKK	
52808	Belanja Bant. Biaya Pemilihan BPD	
52809	Bantuan penunjang kegiatan karang taruna	
52810	Bantuan Penunjang Kegiatan TTG (Wartek Desa)	
52811	Bantuan Penunjang Kegiatan PHBN/PHBI	
52812	Peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDA)	
52813	Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayan Publik	
53	BELANJA TAK TERDUGA	
531	Belanja Tak Terduga	-
53101	Belanja Tak Terduga	



Gambar 9. DPA

Tabel Jurnal

Gambar 10 menggambarkan Tabel Jurnal yang dilengkapi dengan tombol perintah “Kembali ke Menu” dan “Kembali ke Form Input”. Untuk alasan penghematan tempat dan kenyamanan penggunaan, pencatatan dengan metoda *double entry* disajikan secara horisontal. Dengan cara seperti itu, pencatatan dengan basis akrual mudah dilihat, dimana empat kali pencatatan dilakukan pada dua baris yang masing-masing baris mewakili pencatatan metoda *double entry*. Misalnya untuk penerimaan kas (di debit) akibat dari realisasi pendapatan LO (di kredit) yang semula seolah piutang - akan dicatat di baris pertama; maka di baris kedua, akan dicatat perubahan SAL di sisi debit dan lawannya adalah pendapatan LRA di sisi kredit.

Jadi untuk contoh kasus di atas, pencatatan dengan basis akrual dapat mudah dilihat bahwa, akun kas dan akun perubahan SAL akan berada dalam kolom yang sama, begitu juga untuk akun pendapatan LO dan akun pendapatan LRA. Juga, dengan mudah dilihat bahwa akun kas akan terletak sebaris dengan akun pendapatan LO, dan hal serupa berlaku untuk akun perubahan SAL dengan akun pendapatan LRA. Sebagai tambahan (dalam contoh kasus di atas), pengguna bisa faham dengan mudah bahwa lawan akun dari pendapatan LO adalah kas, dan juga lawan akun dari pendapatan LRA adalah akun perubahan SAL.

Meski pengguna bisa mencatat tiap transaksi secara langsung dalam *sheet* (tabel) jurnal, aplikasi menyediakan fasilitas yang lebih teliti dan nyaman melalui (*user*) *form* input jurnal yang akan dibahas nanti di bawah. Selain itu, penggunaan (*user*) *form* input jurnal akan menyelamatkan kode-kode program untuk *sheet* jurnal dari algoritma penghapusan jurnal di tabel menu pada saat

terjadi alih periode (lihat uraian sebelumnya). Untuk alasan-alasan tersebut, Tabel Jurnal hanya dilengkapi dengan dua buah tombol perintah “Kembali ke Menu” dan “Kembali ke Form Input” saja.



Gambar 10. Jurnal

Tabel Buku Besar (BB)

Gambar 11 mengilustrasikan format Tabel Buku Besar (BB) yang dilengkapi dengan dua buah tombol perintah, masing-masing adalah tombol “Kembali ke Menu” dan “Pra Cetak”. Tabel tersebut menampung tiap jenis transaksi sebanyak kode akun yang tersedia dalam BAKun. Pengguna dapat menemukan catatan tiap akun dengan mudah melalui tombol perintah *drop-down* pada tombol kotak perintah di samping kanan tabel. Setelah menyembunyikan baris-baris kosong suatu akun dengan menggunakan fasilitas “filter”, para pengguna dapat membuka data akun tertentu dengan mengklik tombol “Pra-Cetak”, merapikan kembali tampilan sesuai selera, kemudian mencetaknya.



Gambar 11. Buku Besar

Tabel Neraca Saldo (NS)

Disertai sejumlah penyesuaian sesuai keperluan, tiap saldo akun dari buku besar (BB) dikumpulkan dalam sebuah tabel neraca percobaan (*trial balance*) atau dalam aplikasi ini disebut sebagai neraca saldo (NS). Kesamaan nilai total debet dan kredit semua akun dalam NS menunjukkan akurasi dan

validitas pencatatan di tahap-tahap sebelumnya, termasuk penjurnalan dan posting BB, *ceteris paribus*. Selain itu, fungsi dan peran Tabel NS teramat vital karena menjadi input semua jenis laporan keuangan. Ringkasnya, NS menjadi “filter” tentang akurasi dan validitas BB sebelum membuat sejumlah laporan keuangan (i.e LRA, LPSAL, LO, LPE, NR dan bahkan CaLK).

Dalam aplikasi ini, Excel memfasilitasi otomatisasi jenis pekerjaan tersebut melalui beberapa fungsi seperti; **VLOOKUP**, **SUMIF**, **IF**, **LEFT**, dan kombinasinya. Seperti pada Buku Besar, pengguna tidak perlu melakukan apapun terhadap sel-sel dalam Tabel NS. Namun, seperti dengan tabel-tabel lainnya, aplikasi menyediakan fitur “Muat Ulang”, “Pra-Cetak”, dan “Kembali ke Menu” sebagai pelengkap Tabel NS.

 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Parongpong Cihanjuang NERACA SALDO 			
AKUN	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
11101	Kas di Bendahara Desa	-	-
11102	Rekening Kas Desa	-	-
11103	Kas di x	-	-
11104	Kas di xx	-	-
11105	Kas Lainnya	-	-
11106	Setara Kas	-	-
11201	Investasi dalam Saham	-	-
11202	Investasi dalam Deposito	-	-
11203	Investasi dalam SUN	-	-
11204	Investasi dalam SBI	-	-
11205	Investasi dalam SPN	-	-
11206	Investasi Jangka Pendek x	-	-
11207	Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	-

Muat Ulang

Pra Cetak



Kembali ke Menu

Gambar 12. Neraca Saldo (NS)

Tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tabel LRA (Gambar 13), sesuai namanya, terdiri dari akun-akun nomor kepala 4 (pendapatan) dan 5 (belanja). Jika nilai akun-akun nomor 4 lebih besar dari nilai akun-akun nomor 5, maka akan memberikan LRA positif (surplus); dan sebaliknya. LRA positif (surplus) akan menambah SAL, dan sebaliknya; yang akan menjadi input Tabel LPSAL. Untuk pengecekan, nilai surplus/defisit LRA harus sama dengan nilai perubahan SAL (kode 00000, baris terbawah) di tabel NS. Nampak di Tabel NS tersebut, perubahan SAL menjadikan NS seimbang (total debet = total kredit). Sebagai catatan, akun-akun 6, 7 meski masuk kategori akun LRA, tidak masuk dalam Tabel LRA ini, tetapi ada di BAKun, BB, dan NS. Juga, dalam basis akuntansi akrual dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa, lawan akun atau penyebab perubahan SAL adalah akun-akun nomor 4 dan atau 5.

Seperti untuk Tabel BB dan NS, Excel memfasilitasi otomatisasi pekerjaan melalui beberapa fungsi seperti; **IF**, **SUMIF**, **VLOOKUP**, dan kombinasinya. Seperti pada Buku Besar dan NS, pengguna tidak perlu melakukan apapun terhadap sel-sel dalam Tabel LRA. Juga, aplikasi menyediakan fitur “Muat Ulang”, “Pra-Cetak”, dan “Kembali ke Menu” sebagai pelengkap Tabel LRA.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Parongpong Cihanjuang LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk bulan yang Berakhir Tahun Anggaran 2022				
AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN			
41	PENDAPATAN ASLI DESA			
411	Hasil Usaha Desa	-	-	-
41101	Kontribusi/Penyisihan dari BUMDesa	-	-	-
41102	Kontribusi/Penyisihan dari BUMDes	-	-	-
41103	Kontribusi/Penyisihan dari PAB-MC	-	-	-
412	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	-	-	-
41201	Tanah Kas Desa	-	-	-
41202	Bangunan Desa	-	-	-
41203	Jalan Desa	-	-	-
41204	Lain-lain Kekayaan Milk Desa	-	-	-



Gambar 13. Tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tabel Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gabungan saldo dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperbolehkan. Sebagai catatan, SiLPA dengan huruf 'i' kecil adalah singkatan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Perdefinisi, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan kata lain, SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBDes tahun anggaran berjalan/berkenaan. Dalam Gambar 14, Perubahan SAL (PSAL) merupakan selisih SAL di kolom tahun berjalan dengan SAL di kolom tahun sebelumnya (lihat dua kolom di baris 8). Dengan kata lain, SAL di tahun berjalan antara lain mencakup nilai surplus/defisit LRA di Tabel LRA. Di periode berikutnya, nilai perubahan SAL (akun nomor 00000) akan dianggap sebagai aset.

Excel secara otomatis akan memberikan nilai SAL untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan selisihnya yaitu perubahan SAL juga dilaporkan di bagian bawah tabel. Tidak ada perintah Excel yang baru di sini. Juga karena serupa, program untuk kotak tombol perintah "Pra-Cetak" dan "Kembali ke Menu" dapat diduplikasi dari uraian sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Parongpong Cihanjuang LAPORAN PERUBAHAN SAL Untuk bulan yang Berakhir Tahun Anggaran 2022			
No	KETERANGAN	JUMLAH	
		28 Juli 2022	31 Januari 2022
1	Saldo Anggara Lebih- awal		
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan		
3	Sub Total (1-2)	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	-	-
5	Sub Total (3+4)	-	-
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0
7	Lain-Lain	0	0
8	Saldo Anggaran Lebih - akhir (5+6+7)	-	-



Gambar 14. LPSAL

Tabel Laporan Operasional (LO)

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Parongpong Cihanjuang LAPORAN OPERASIONAL Untuk bulan yang Berakhir Tahun Anggaran 2022		
AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH
8	PENDAPATAN	
81	PENDAPATAN ASLI DESA	
811	Hasil Usaha Desa	-
812	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	-
813	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	-
814	Hasil Gotong Royong	-
815	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	-
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	-
82	BAGI HASIL PAJAK	
821	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-
	Jumlah Bagi Hasil Pajak	-



Gambar 15. Laporan Operasional (LO)

Tabel LO (Gambar 15) terdiri dari akun-akun dengan nomor kepala 8 (pendapatan LO) dan 9 (belanja LO) yaitu akun-akun yang akan mempengaruhi perubahan ekuitas. Adanya laporan operasional adalah akibat dari penerapan basis akrual. Defisit LO akan mengurangi ekuitas, dan sebaliknya surplus LO akan menambah ekuitas. Nilai-nilai akun pada LO diambil secara otomatis oleh Excel dari nomor-nomor akun kepala 8 dan 9 dari Tabel NS. Untuk itu, program Excel yang digunakan adalah **VLOOKUP**, dan **SUMIF**. Program Excel untuk tombol-tombol perintah “Muat Ulang”, “Pra Cetak”, dan “Kembali ke Menu” bisa di *copy* dari uraian sebelumnya.

Tabel Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Input Tabel Perubahan Ekuitas (LPE) terutama bersumber dari Ekuitas Awal ditambah dengan Suplus/Defisit LO. Excel secara otomatis akan memindahkan nilai ekuitas akhir dari LO (baris 8) sebagai input ekuitas di laporan Neraca. Untuk Tabel LPE inipun tidak ada program Excel yang baru. Juga program untuk tombol perintah “Pra Cetak” dan “Kembali ke Menu” dapat direplikasi dari uraian sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Parongpong Cihanjuang LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk bulan yang Berakhir Tahun Anggaran 2022		
No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Ekuitas Awal	-
2	Surplus/Defisit LO	-
3	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	-
4	Dampak akumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	-
5	Koreksi Nilai Persediaan	-
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
7	Lain-lain	-
8	Ekuitas Akhir	-



Gambar 16. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Tabel Neraca (NR)

Tabel Neraca (Gambar 17) menampung akun-akun dengan nomor kepala 1 (aset), 2 (hutang), dan 3 (ekuitas). Menyimak uraian sebelumnya, sekarang mudah difahami bahwa, ekuitas dalam neraca dipengaruhi oleh surplus/defisit LO dari Tabel LO atau LPE. Surplus LO akan menambah ekuitas di neraca, dan sebaliknya. Juga, meski tidak bermaksud mengatakan hubungan pengaruh, perubahan SAL akan tercermin dalam perubahan aset di neraca. Lagi, Excel akan bekerja secara otomatis mengambil data dari Tabel NS dan LPE. Program Excel yang digunakan adalah **SUMIF**, **IFERROR**, **INDEX**, **MATCH**, dan kombinasinya. Program Excel untuk tombol-tombol perintah sama seperti untuk tabel-tabel lainnya.



Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Parongpong Ciharjuang NERACA Per 14 Juli 2022			
AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH 28 Juli 2022	JUMLAH 31 Januari 2022
1	ASET		
11	ASET LANCAR		
111	Kas dan Setara Kas		
11101	Kas di Bendahara Desa		
11102	Rekening Kas Desa		
11103	Kas di x		
11104	Kas di xx		
11105	Kas Lainnya		

Gambar 17. Neraca (NR)

Spesifikasi User Form dalam ASAD

User Form, atau disebut juga sebagai kotak dialog, adalah bagian dari antarmuka pengguna aplikasi Ms. Excel. Dalam VBA Excel, *User Form* memiliki banyak fitur yang berguna untuk mempermudah input data secara optimal (i.e. efisien, produktif & efektif). Untuk melakukan input data yang aman (pengamanan data), input data berulang, lembar sheet yang banyak, dan sebagainya adalah beberapa contoh manfaat *User Form*. Untuk sementara, ASAD hanya menyediakan tiga buah *User Forms*; login, Input SAA dan Input Jurnal. Sesuai namanya, *User Form Login* digunakan untuk masuk ke dan keluar dari ASAD. *User Form Input SAA* dan *Jurnal*, sesuai namanya, masing-masing untuk input data di Tabel SAA dan Jurnal. Berikut di bawah adalah tampilan berikut kode-kode program untuk masing-masing *User Forms* yang dimaksud.

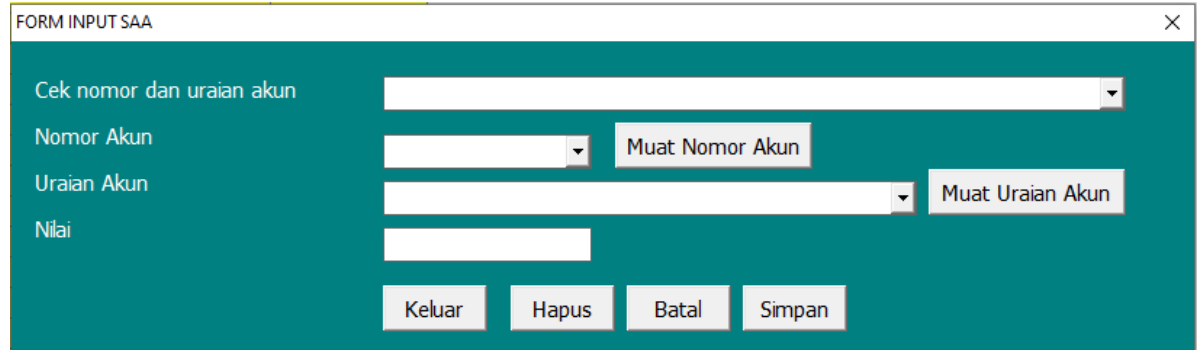
User Form Login



Gambar 18. User Form Login

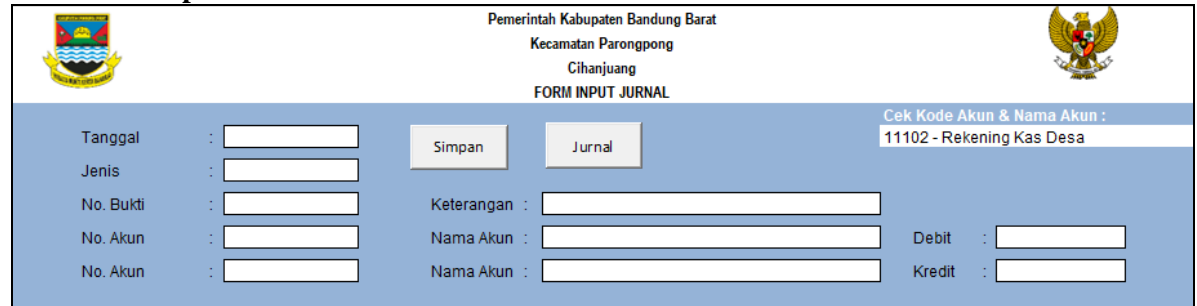
Gambar 19 berikut adalah sejumlah kode-kode program VBA Excel untuk membuat *User Form Login*.

User Form SAA



Gambar 19. User Form SAA

User Form Input Jurnal



Gambar 20. Gambar User Form Input Jurnal

PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan PkM, peserta mendengarkan penjelasan atas pemberian materi pelatihan dan pendampingan terkait konsep Siklus Anggaran dan Siklus Akuntansi dan penerapannya. Dilanjutkan dengan Praktik hasil Perancangan Aplikasi Pendukung SisKeuDes. Dalam pemberian materi ini, perlu diukur tingkat ketercapaiannya; seperti yang dinyatakan oleh Mayangsari dkk. (2021) bahwa perlunya dilakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan PkM setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan dengan survei yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta pada saat sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan dan pendampingan.

Setelah selesai pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan PkM, peserta diberikan *post test*; dilanjutkan dengan acara evaluasi pelaksanaan oleh Reviewer PkM dan umpan balik dari Camat Parongpong dan Pemdes Kab. Bandung Barat. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PkM, ditunjukkan pada Tabel berikut:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kompetensi aparatur pemerintah desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam tata kelola keuangan desa. Perlu dilakukan pendampingan untuk proses pemeliharaan kompetensi aparatur pemerintah desa. Aplikasi Pendukung SisKeuDes sangat bermanfaat dan mudah diaplikasikan. Perlu pengembangan lebih lanjut untuk Aplikasi Pendukung SisKeuDes dengan cara pemantauan secara langsung di lapangan dan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada: (1) Kepala P3M Politeknik Negeri Bandung, (2) Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, (3) Camat Parongpong dan Pemerintah Desa di wilayahnya serta Para Perangkat Desa di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, (4) Semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Bawono, A. D. M. Kinasih, and A. K. Rahayu, "Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES)," *Journal of Accounting and Investment*, vol. 21, no. 3, 2020, doi: 10.18196/jai.2103160.
- A. Saputro, M. R. Sholihin, and H. Purnomo, "Management of Village Funds in Accordance with Permendagri Number 20 of 2018," vol. 5, no. 20, pp. 63-73, 2021.
- N. Paranoan, C. J. Tandirerung, and A. Paranoan, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Sitem Informasi Akuntansi," vol. 2, no. 74, pp. 140-147, 2019.
- M. Juardi, Sardi, M. Muchlis, and R. Amalia Putri, "Evaluasi Penggunaan Aplikasi SisKeuDes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa," *J. Ilm. Akunt. Perad.*, vol. IV, no. 1, pp. 2597-9116, 2018.
- G. Gayatri and M. Y. Latrini, "Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 13, no. 2, pp. 113-122, 2018.
- A. Arianto and A. Kahpi, "Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)," *Alauddin Law Dev. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 183-194, 2020.
- A. Faizah and R. Sari, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun," *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, vol. 5, no. 1, pp. 763-776, 2022, doi: 10.36778/jesya.v5i1.539.
- D. M. Wibowo, "Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri," Retrieved from https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategi_mewujudkan-desa-sejahtera-mandiri, 2019.
- V. A. Muliana, "Huaxi, Desa Miskin yang Kini Jadi Terkaya di China," Retrieved from https://www.liputan6.com/bisnis/read/2909758/huaxi-desa-miskin-yang-kini-jadi_terkaya-di-china, 2017.
- N. M. D. Artini, M. A. Wahyuni, and N. T. Herawati, "Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam konteks disiplin diri pada desa tigawasa," *E-Journal S1 Ak Univ. Pendidik. Gane*, vol. 8, no. 2, p. 11, 2017.
- L. Medianti, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Pemodesari (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bayat)," *Jom Feb*, vol. 1, no. 1, pp. 1-13, 2018.
- S. Mayangsari, Banjarnahor, E., Lenggogeni, L. J., & Nasution, K. M. P. (2021). Pelatihan Konsep Analisis Laporan Keuangan kepada UMKM. *Jurnal Abdikaryasakti*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.25105/ja.v1i1.8912>.
- , UU No. 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
- , UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- , PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- , UU No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

- , Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Penatausahaan dan Akuntansi Dana Desa
- , Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- , Permendesa PDTT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa